

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(INKRACHT) DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

KHELSYAGENIA F. DELDNINDA

2010112067

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Tenofrimer, S.H., M.H.

Yandriza, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 21/PK-IV/I/2026



No. Alumni Universitas	Khelsyagenia F. Deldninda	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 1 September 2001	f. Tanggal Lulus : 27 Januari 2026	
b. Nama Orangtua : Desfami Erianyo	g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 5 Tahun 5 Bulan	
d. PK : Hukum Pidana	i. IPK : 3.75	
e. No. BP : 2010112067	j. Alamat : Aspol Jati, Padang.	

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

Khelsyagenia F. Deldninda, 2010112067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Pidana, 86 + viii Halaman, 2026.

ABSTRAK

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan halaman 3 poin 4 Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan yang menjelaskan setelah menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah adanya putusan pengadilan. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini tidak dilakukan. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok. Kedua, apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan pihak Kejaksaan Negeri Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Surat Edaran yang sudah berlaku. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok adalah banyaknya perkara narkotika, kesulitan menentukan waktu dengan berbagai kepala instansi yang berwenang, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat, adanya kendala biaya dan cuaca. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok adalah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika, melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, dan mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah.

Kata Kunci: Pemusnahan, Barang Bukti Narkotika, Putusan Pengadilan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Khelsyagenia F. Deldninda	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Bukittingi/ 1 September 2001 b. Parents' Name : Desfami Erianyo c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2010112067	f. Graduation Date : 27 th January 2026 g. Pass Predicate : Very Satisfactory h. Length of Study : 5 Years 5 Month i. GPA : 3.75 j. Address : Aspol Jati, Padang	

THE IMPLEMENTATION OF THE DESTRUCTION OF NARKOTICS EVIDENCE WITH FINAL AND BINDING LEGAL FORCE (INKRACHT) AT THE SOLOK DISCTRIC PROSECUTOR'S OFFICE

Khelsyagenia F. Deldninda, 2010112067, Faculty of Law, Andalas University, Criminal Law, 86 Pages + viii, 2026.

ABSTRACT

Article 27 paragraph (4) of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2013 concerning the Implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and page 3 point 4 of Circular Letter No. SE-001/A/JA/02/2019 concerning the Optimization of the Implementation of Court Decisions (Execution) on Seized Objects explain that after receiving a court decision that has obtained permanent legal force (inkracht), the prosecutor as executor is obliged to carry out the execution of destruction within 7 days after the court ruling. However, in practice, this provision is not implemented. This research discusses three problem formulations. First, how is the implementation of the destruction of narcotics evidence that has obtained permanent legal force (inkracht) at the Solok District Prosecutor's Office. Second, what obstacles are faced by the Prosecutor's Office in carrying out the destruction of narcotics evidence that has obtained permanent legal force (inkracht) at the Solok District Prosecutor's Office. Third, what efforts can be made to overcome the obstacles faced by the Prosecutor's Office in carrying out the process of destroying narcotics evidence that has obtained permanent legal force (inkracht) at the Solok District Prosecutor's Office. This study uses an empirical research method, with primary data as the main data and secondary data as supporting data. The research data were obtained through semi-structured interviews with the Solok District Prosecutor's Office. The results of the study show that, first, the implementation of the destruction of narcotics evidence that has obtained permanent legal force (inkracht) at the Solok District Prosecutor's Office is not in accordance with the applicable Law and Circular Letter. Second, the obstacles faced by the Prosecutor's Office in carrying out the destruction of narcotics evidence that has obtained permanent legal force (inkracht) at the Solok District Prosecutor's Office include the large number of narcotics cases, difficulties in determining schedules with various heads of authorized agencies, the very limited time provided to carry out the destruction, as well as budgetary and weather-related constraints. Third, the efforts that can be made to overcome these obstacles include coordinating with the West Sumatra High Prosecutor's Office, supervising narcotics evidence, evaluating field constraints, and proposing additional budget allocations to the government.

Keywords: *Destruction, Narcotics Evidence, Court Decision.*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at , 27th January 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: